

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Rajawali Pers, Jakarta

....., 2022, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial setelah Perubahan UUD NRI 1945*, RajaGrafindo Persada, Depok

Ida Budhiati, 2018, *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi Hukum Universitas Diponegoro

Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Ilmu Hukum Tata Negara II*, Konstitusi Press, Jakarta.

..... 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

..... 2010 *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

..... 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta

Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publsishing, Malang.

Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta

- 2021, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok
- 2021, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Rajawali Pers, Depok
- Laurensilus Arliman Simbolon, 2019, *Lembaga-lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers NTB, Nusa Tenggara Barat
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 2010 *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Victor Imanuel W.Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang
- Wilma Sillahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan telah mengalami perubahan kembali pada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 dan telah mengalami perubahan kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2024
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota

JDIH BPK “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*”,
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-
tahun-2024](https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-tahun-2024), dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025

JDIH BPK “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta*

Walikota dan Wakil Walikota”,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/309989/peraturan-kpu-no-17-tahun-2024>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025

JDIH BPK “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024* tentang Penyesunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/289127/peraturan-kpu-no-7-tahun2024#:~:text=CATATAN:Lampiran%20file:%2059%20hlm>. dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025

Act Amending Republic act No.8436 “*Republic of The Philippines*”

https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2007/ra_9369_2007.html. dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2024

United States Election Assistance Commission “*Help America Vote Act*”

https://www.eac.gov/about/help_america_vote_act.aspx, dikunjungi pada tanggal 26 Mei 2025

Supreme Court E-Library, “*Article IX, October 15, 1986, Commission Election*”

<https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/45/25552>, dikunjungi pada tanggal 26 Mei 2025

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023

D. Jurnal

Allan Fatchan Gani Wardhana, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1

Bruce Ackerman, 2000, *The New Separation of Powers*, Harvad Law Review, Vol. 113:633

Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu 2020, *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Datuk Sulaiman Law Review, Vol. 1, No. 1

Ilhamdi Putra, Khairul Fahmi, *Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021

John Martin, *Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Norma pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1, No. 2.

Khairul Fahmi, Feri Amsari, Busyra Azheri, *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat* Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, 2020

....., Ilhamdi Putra, Beni Kharisma, *Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 1

....., *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 4, 2017

M. Helmi Fahrozi, *Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Vol. 2, No. 1, 2024

M. Ridho Maulana, Delfina Gusman, Ilhamdi Putra, *Perbandingan Sistem Kepartaian dan Sistem Kepemiluan Indonesia-Amerika Serikat dalam Penyederhanaan Partai Politik*, Jurnal Lareh Law Review, Vol. 2, No. 2, 2024

Mhd. Ansori, Saldi Isra, Dian Bakti Setiawan, Khairul Fahmi, 2024, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 8, No. 1

Muhammad Nur Ramadhan, *Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 4, November 2022.

Muhammad Rosyid Ridho, 2022, *Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Agama dan Sosial Humaniora. Vol. 1 No. 2, Mei.

Ni Ketut Sari Andyani & Iwayan Landrawan, 2023, "*Comparing the President's Authority in Forming Laws in Indonesia, the United States and Turkey*" International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Faculty of Law and Social Sciences, Ganesha University of Education, Vol. 10, No. 9

Nizar Apriansyah, 2016, *Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making)*, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 2

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Sistem Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Vol. 2, No. 2. 2023

Pariadi, *Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Unizar Recht Journal, Vol. 2 No.3, Oktober 2023.

Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, Administrative Law & Governance, Vol. 3, No. 3, 2020

Sylvania Okta Aurelia, *Dinamika Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 4, 2024

Teddy Handiar Yobel, *Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 1, No. 2

Wiwin Sri Rahyani, *Independensi OJK Terusik?*, Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional

E. Risalah Sidang

Risalah Sidang dan Laporan Singkat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 September 2016

Risalah Sidang Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023

F. Internet

ICW, “*Langgar Kode Etik Empat Kali, Ketua KPU RI Harus Segera Mundur*”, <https://www.antikorupsi.org/id/langgar-etik-empat-kali-ketua-kpu-ri-harus-segera-mundur> dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025

Victorio Mantalean dalam Kompas, “*Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Terpidana Korupsi Irman Gusman*” <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025,

Eka Yudha Saputra dalam Tempo, “*KPU Keluhkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 Terlalu Mepet*” <https://www.tempo.co/politik/kpu-keluhkanpenyelenggaraan->

[pemilu-dan-pilkada-2024-terlalu-mepet-1202278](#) dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2025

Tempo, “*Tahapan-Tahapan Pilkada 2024 yang Digelar Serentak 27 November Mendatang*”, <https://www.tempo.co/pemilu/tahapan-tahapan-pilkada-2024-yang-digelar-serentak-27-november-mendatang-66390>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025

